



**STANDAR PELAYANAN  
UNIT KERJA DI LINGKUNGAN  
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
2008**

## KATA PENGANTAR

Sebagai unsur lembaga pemerintah pusat yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan negara, Sekretariat Negara harus selalu meningkatkan kinerjanya agar semakin efektif, efisien, transparan, responsif, dan akuntabel. Upaya tersebut telah dilakukan antara lain dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Standar Pelayanan Sekretariat Negara Republik Indonesia, yang mewajibkan seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Negara untuk menyusun standar pelayanan. Penyusunan standar pelayanan ini sejalan pula dengan program kerja reformasi birokrasi yang tengah digulirkan di lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri tersebut di atas, seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Negara telah menyusun standar pelayanan, yang seluruhnya berjumlah 152 standar pelayanan, dan telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 10 Tahun 2008. Pengguna pelayanan dari standar pelayanan tersebut mencakup seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Negara/instansi lain/masyarakat luas, serta pengguna pelayanan yang bersifat khusus, seperti Presiden, Wakil Presiden, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Wakil Presiden, dan Deputi masing-masing, serta Tamu Negara.

Standar pelayanan ini merupakan pedoman bagi pelaksana pelayanan di lingkungan Sekretariat Negara dalam melaksanakan pelayanan dan sebagai informasi bagi pengguna pelayanan di lingkungan Sekretariat Negara dan/atau di luar Sekretariat Negara, baik berasal dari instansi terkait maupun masyarakat luas.

Diharapkan standar pelayanan ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan tanggung jawab. Bagi satuan organisasi/unit kerja yang secara fungsional memiliki tugas di bidang ketatalaksanaan agar mengevaluasi pelaksanaan standar pelayanan tersebut, serta berkoordinasi dengan unit pelayanan untuk menyempurnakan dan mengembangkannya.

MENTERI SEKRETARIS NEGARA,



M. HATTA RAJASA

PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

STANDAR PELAYANAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN  
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Standar Pelayanan Sekretariat Negara Republik Indonesia, dan guna menjamin terselenggaranya kinerja pelayanan unit kerja di lingkungan Sekretariat Negara secara efektif, efisien, responsif, transparan, dan akuntabel, telah disusun standar pelayanan unit kerja di lingkungan Sekretariat Negara Republik Indonesia;
  - b. bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan Standar Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Negara Republik Indonesia dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2005 tentang Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2007;
  2. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden;
4. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Standar Pelayanan Sekretariat Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA TENTANG STANDAR PELAYANAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Standar Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Negara Republik Indonesia adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Standar Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Negara Republik Indonesia merupakan pedoman bagi pelaksana pelayanan di lingkungan Sekretariat Negara dalam melaksanakan pelayanan dan sebagai informasi bagi pengguna pelayanan di lingkungan Sekretariat Negara dan/atau di luar Sekretariat Negara.

Pasal 3

Evaluasi terhadap Standar Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Negara Republik Indonesia dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 4...

- 3 -

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Oktober 2008

MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HATTA RAJASA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT NEGARA RI  
Kepala Biro Organisasi dan Humas,



Djadjuk Natsir

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 2008  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN  
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

## DAFTAR ISI

A.	Standar Pelayanan di Lingkungan Rumah Tangga Kepresidenan.....	1
1.	Deputi Kepala Rumah Tangga Kepresidenan Bidang Kerumahtangaan dan Pengelolaan Istana.....	1
a.	Biro Umum.....	1
	Standar Pelayanan Perencanaan Bangunan di Lingkungan Rumah Tangga Kepresidenan.....	1
b.	Biro Pelayanan Kerumahtangaan.....	6
	Standar Pelayanan Kegiatan Pelayanan Kerumahtangaan Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden, Tamu Negara, serta Kegiatan Penting Lainnya.....	6
c.	Biro Istana-istana.....	13
1)	Standar Pelayanan Permohonan Izin Kunjungan Masyarakat ke Istana-istana Presiden di Daerah.....	13
2)	Standar Pelayanan Perawatan Benda-Benda Seni Bahan Logam Koleksi Rumah Tangga Kepresidenan.....	18
2.	Deputi Kepala Rumah Tangga Kepresidenan Bidang Protokol Pers dan Media.....	25
a.	Biro Protokol.....	25
1)	Standar Pelayanan Penyiapan Acara Harian Presiden dan Istri/Suami Presiden .....	25
2)	Standar Pelayanan Penyiapan dan Pendistribusian Undangan Acara yang Dipimpin/Dihadiri oleh Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden.....	30
b.	Biro Pers dan Media.....	35
1)	Standar Pelayanan Peliputan Kegiatan Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden, Tamu Negara, serta Kegiatan Penting Lainnya.....	35
2)	Standar Pelayanan Pemantauan dan Analisis Berita di Lingkungan Rumah Tangga Kepresidenan.....	41
c.	Biro Dokumentasi dan Pelayanan Informasi Pers dan Media.....	46
1)	Standar Pelayanan Dokumentasi Naskah, Foto, dan Audio Visual Kegiatan Presiden, dan/atau Istri/Suami Presiden, Tamu Negara, dan Kegiatan Penting Lainnya di Lingkungan Rumah Tangga Kepresidenan.....	46
2)	Standar Pelayanan Sistem Informasi Kegiatan Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden, Tamu Negara, dan Kegiatan Penting Lainnya.....	51
B.	Standar Pelayanan di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden.....	57
1.	Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Politik.....	57
a.	Biro Hubungan Internasional.....	57
	Standar Pelayanan Pengamatan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah di Bidang Hubungan Internasional.....	57
b.	Biro Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri.....	63
	Standar Pelayanan Pengamatan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah di Bidang Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri.....	63

c.	Biro Pertahanan Negara, Keamanan, dan Ketertiban.....	69
	Standar Pelayanan Pengamatan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah di Bidang Pertahanan Negara, Keamanan, dan Ketertiban.....	69
d.	Biro Kehakiman, Hukum, dan Hak Asasi Manusia.....	75
	Standar Pelayanan Pengolahan Data, Informasi, dan Laporan Masalah di Bidang Kehakiman, Hukum, dan Hak Asasi Manusia....	75
e.	Biro Kewilayahan dan Wawasan.....	81
	Standar Pelayanan Pengamatan Kebijakan Pemerintah di Bidang Kewilayahan dan Wawasan.....	81
2.	Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Ekonomi.....	87
a.	Biro Moneter dan Keuangan.....	87
	Standar Pelayanan Pengamatan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah di Bidang Moneter dan Keuangan Negara, Penanaman Modal, Badan-Badan Usaha, dan Perpajakan.....	87
b.	Biro Perdagangan dan Kerjasama Internasional.....	93
	Standar Pelayanan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah di Bidang Perdagangan dan Kerjasama Bilateral, Regional, dan Multilateral pada Biro Perdagangan dan Kerjasama Internasional.....	93
c.	Biro Produksi.....	99
	Standar Pelayanan Pengamatan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah di Bidang Produksi.....	99
d.	Biro Prasarana Dasar dan Energi.....	105
	Standar Pelayanan Pengamatan Perkembangan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah di Bidang Prasarana Dasar, Perhubungan, Transportasi, Telekomunikasi, dan Energi.....	105
3.	Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kesejahteraan Rakyat.....	111
a.	Biro Agama dan Sosial.....	111
	Standar Pelayanan Pengamatan Perkembangan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah di Bidang Agama, Kependudukan, Sosial dan Keluarga Berencana.....	111
b.	Biro Pendidikan, Kebudayaan, dan Olah Raga.....	117
	Standar Pelayanan Pengamatan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga.....	117
c.	Biro Kesehatan, Lingkungan Hidup, dan Perumahan Rakyat.....	123
	Standar Pelayanan Pengamatan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah di Bidang Kesehatan, Lingkungan Hidup, dan Perumahan Rakyat.....	123
d.	Biro Pemberdayaan Perempuan, Usaha Mikro, Kecil, dan Ketenagakerjaan.....	129
	Standar Pelayanan Pengamatan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Bimbingan Anak, Usaha Mikro, Kecil, dan Ketenagakerjaan.....	129
4.	Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Dukungan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan.....	135



a.	Biro Dukungan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah.....	135
	Standar Pelayanan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah.....	135
b.	Biro Dukungan Pengawasan Pembangunan dan Pengelolaan Kekayaan Negara.....	141
	Standar Pelayanan Pengawasan Pembangunan dan Pengelolaan Kekayaan Negara.....	141
c.	Biro Pemantauan Pemberantasan Korupsi.....	147
	Standar Pelayanan Pengamatan Perkembangan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah di Bidang Pemantauan Pemberantasan Korupsi.....	147
d.	Biro Pengelolaan Data dan Pengaduan Masyarakat.....	153
	Standar Pelayanan Pengelolaan Data dan Pengaduan Masyarakat	153
5.	Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Administrasi.....	158
a.	Biro Protokol dan Persidangan.....	158
	1) Standar Pelayanan Penyiapan Acara Harian Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden .....	158
	2) Standar Pelayanan Penyiapan Acara Kunjungan Kerja Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden ke Daerah .....	163
	3) Standar Pelayanan Penyiapan Acara Kunjungan Kerja Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden ke Luar Negeri.....	170
b.	Biro Umum.....	177
	1) Standar Pelayanan Pengelolaan Anggaran, Pembayaran dan Pertanggungjawaban di Lingkungan Sekretariat Wakil Presiden	177
	2) Standar Pelayanan Penyiapan dan Perawatan Kendaraan Dinas di Lingkungan Sekretariat Wakil Presiden .....	182
	3) Standar Pelayanan Penataan Lingkungan di Lingkungan Sekretariat Wakil Presiden.....	187
c.	Biro Tata Usaha.....	193
	Standar Pelayanan Peminjaman dan Pengembalian Bahan Pustaka di Lingkungan Sekretariat Wakil Presiden (Sistem Online)	193
d.	Biro Media Massa.....	199
	Standar Pelayanan Peliputan dan Pendokumentasian Kegiatan Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden serta Layanan Media Massa.....	199
e.	Biro Perlengkapan dan Kerumahtanggaan.....	211
	Standar Pelayanan Urusan Perlengkapan, Bangunan dan Kerumahtanggaan di lingkungan Sekretariat, Istana dan Kediaman Resmi Wakil Presiden.....	211
f.	Pusat Penerjemahan dan Penyiapan Naskah.....	216
	1) Standar Pelayanan Penerjemahan Dokumen di Lingkungan Sekretariat Wakil Presiden .....	216
	2) Standar Pelayanan Penghimpunan Notulensi Audiensi, Rapat, dan Kunjungan Kerja Wakil Presiden .....	220
	3) Standar Pelayanan Pendokumentasian Transkrip Naskah Pidato Wakil Presiden .....	224

C.	Standar Pelayanan di lingkungan Sekretariat Militer.....	229
	a. Biro Administrasi TNI dan Polri.....	229
	1) Standar Pelayanan Penyiapan Administrasi Penerbitan Keputusan Presiden tentang Pemberhentian Dengan Hormat dari Dinas Keprajuritan TNI dan Polri.....	229
	2) Standar Pelayanan Penyiapan Administrasi Penerbitan Keputusan Presiden tentang Kenaikan Pangkat Golongan PATI/PAMEN TNI dan Polri.....	236
	3) Standar Pelayanan Penyiapan Administrasi Penerbitan Keputusan Presiden tentang Pengangkatan Pertama Perwira TNI dan Polri.....	243
	b. Biro Operasi dan Pengamanan.....	250
	1) Standar Pelayanan Pengkoordinasian Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden Beserta Keluarganya di Dalam Negeri.....	250
	2) Standar Pelayanan Pengkoordinasian Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden Beserta Keluarganya ke Luar Negeri.....	256
	3) Standar Pelayanan Pengkoordinasian Pengamanan Kunjungan Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan Negara Asing.....	262
	4) Standar Pelayanan Pengkoordinasian Pengamanan Sandi dan Elektronika Terhadap Presiden dan Wakil Presiden Beserta Keluarganya.....	270
	5) Standar Pelayanan Pengkoordinasian Penyiapan Sarana Angkutan Kunjungan Presiden, Wakil Presiden Beserta Keluarganya, serta Tamu Negara.....	277
	6) Standar Pelayanan Pengumpulan dan Pengolahan Data Intelijen dalam Mendukung Kegiatan Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta Keluarganya serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan.....	285
	c. Biro Tanda-tanda Jasa/Kehormatan.....	292
	Standar Pelayanan Administrasi Penganugerahan Gelar dan Tanda Kehormatan.....	292
D.	Standar Pelayanan di lingkungan Sekretariat Menteri Sekretaris Negara.....	303
	a. Biro Perencanaan.....	303
	1) Standar Pelayanan Pengkoordinasian Penyusunan Rencana Strategik Sekretariat Negara.....	303
	2) Standar Pelayanan Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Renja-KL) Sekretariat Negara Bagian Anggaran 007.01.....	309
	3) Standar Pelayanan Penyusunan dan Pengkoordinasian Rencana Kerja (Renja) Bagian Anggaran 007 (Sekretariat Negara).....	315
	4) Standar Pelayanan Penyusunan dan Pengkoordinasian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bagian Anggaran 007 (Sekretariat Negara).....	320
	5) Standar Pelayanan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) Pagu Sementara Sekretariat Negara Bagian Anggaran 007.01.....	327

6) Standar Pelayanan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) Pagu Definitif Sekretariat Negara Bagian Anggaran 007.01.....	333
7) Standar Pelayanan Penyusunan Konsep Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Negara Bagian Anggaran 007.01.....	339
8) Standar Pelayanan Koordinasi Penyusunan Dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 007 (Sekretariat Negara).....	345
9) Standar Pelayanan Penyusunan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Negara Bagian Anggaran 007.01 dan Satuan Kerja Lainnya yang Berada di Bawah Koordinasi Sekretariat Negara.....	350
10) Standar Pelayanan Penyusunan Revisi Petunjuk Operasional Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (POK DIPA) Sekretariat Negara Bagian Anggaran 007.01 dan Satuan Kerja Lainnya yang Berada di Bawah Koordinasi Sekretariat Negara.....	356
11) Standar Pelayanan Penyusunan Permohonan Anggaran Biaya Tambahan (ABT).....	361
12) Standar Pelayanan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Laporan Triwulanan).....	366
13) Standar Pelayanan Koordinasi Penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN Bagian Anggaran 007 (Sekretariat Negara).....	371
14) Standar Pelayanan Penyusunan Standar Harga Satuan Barang/Jasa di Lingkungan Bagian Anggaran 007 (Sekretariat Negara).....	375
15) Standar Pelayanan Penyusunan Standar Biaya Khusus di Lingkungan Bagian Anggaran 007 (Sekretariat Negara).....	381
b. Biro Keuangan.....	386
1) Standar Pelayanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Bagi Menteri/Pejabat Setingkat Menteri, dan Pejabat/Pegawai di Lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet.....	386
2) Standar Pelayanan Pembayaran Uang Lembur Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Sekretariat Negara.....	391
3) Standar Pelayanan Pembayaran Uang Makan Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Sekretariat Negara.....	396
4) Standar Pelayanan Pembayaran Uang Duka Wafat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet.....	401
5) Standar Pelayanan Pembayaran Tunjangan Khusus Pelayanan Tugas Kepresidenan di Lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet.....	406
6) Standar Pelayanan Pembayaran Honorarium pada Satuan Kerja Sekretariat Negara.....	411
7) Standar Pelayanan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas pada Satuan Kerja Sekretariat Negara.....	416
8) Standar Pelayanan Pembayaran Uang Persediaan oleh Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Sekretariat Negara.....	421

9) Standar Pelayanan Pembayaran Uang Persediaan oleh Pemegang Uang Muka di Lingkungan Satuan Kerja Sekretariat Negara.....	426
10) Standar Pelayanan Penggantian Uang Persediaan pada Satuan Kerja Bagian Anggaran 007.01.....	431
11) Standar Pelayanan Pembayaran Tagihan Pihak Ketiga pada Bagian Anggaran 007.01 dan Bagian Anggaran 069.03.....	436
12) Standar Pelayanan Pembayaran Honorarium dan Tunjangan Kerja pada Satuan Kerja Komisi Ombudsman Nasional.....	443
13) Standar Pelayanan Pembayaran Honorarium di Lingkungan Satuan Kerja Lembaga Lain yang Anggarannya Secara Administratif Dikoordinasikan oleh Sekretariat Negara.....	448
14) Standar Pelayanan Pembayaran Insentif Pasukan Pengamanan Presiden pada Bagian Anggaran 069.03 Sekretariat Negara.....	454
15) Standar Pelayanan Pembayaran Uang Persediaan oleh Bendahara Pengeluaran dan Pemegang Uang Muka di Lingkungan Satuan Kerja Lembaga Lain yang Anggarannya Secara Administratif Dikoordinasikan oleh Sekretariat Negara...	459
16) Standar Pelayanan Pembayaran Perjalanan Dinas pada Satuan Kerja Lembaga Lain yang Anggarannya Secara Administratif Dikoordinasikan oleh Sekretariat Negara.....	465
17) Standar Pelayanan Penetapan Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja Bagian Anggaran 007 dan 069 Sekretariat Negara.....	471
18) Standar Pelayanan Penetapan Staf Pengelola Keuangan, Pejabat/Panitia Pengadaan dan tim Pemeriksa Barang/Jasa Pada Satuan Kerja Bagian Anggaran 007.01 dan 069.03 Bagian Anggaran Pelaksana 007.01.....	478
19) Standar Pelayanan Penyusunan Laporan Keuangan Audited Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) Sekretariat Negara Bagian Anggaran 007 dan 069.....	484
20) Standar Pelayanan Pembinaan dan Monitoring Penyusunan Laporan Keuangan dari tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Sampai Dengan Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Eselon 1 (UAPPA-E1) Bagian Anggaran 007 (Sekretariat Negara).....	490
21) Standar Pelayanan Penyusunan Laporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) Sekretariat Negara Bagian Anggaran 007.01 dan 069.03....	496
22) Standar Pelayanan Penyusunan Laporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Sekretariat Negara dan Lembaga Lain yang Anggarannya Secara Administratif Dikoordinasikan oleh Sekretariat Negara .....	503
23) Standar Pelayanan Penyusunan Laporan Keuangan Unaudited Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) Sekretariat Negara Bagian Anggaran 007 dan 069.....	511
24) Standar Pelayanan Penyusunan Laporan Perkembangan dan Analisis Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga Sekretariat Negara.....	518

c.	Biro Tata Usaha.....	524
1)	Standar Pelayanan Pengkoordinasian Penyusunan Acara dan Pelaksanaan Keprotokolan Menteri Sekretaris Negara.....	524
2)	Standar Pelayanan Peminjaman Arsip di Lingkungan Sekretariat Negara .....	531
3)	Standar Pelayanan Pengkoordinasian, Pengendalian, dan Pengurusan Surat di Lingkungan Sekretariat Negara.....	536
4)	Standar Pelayanan Penyimpanan Arsip Inaktif di Lingkungan Sekretariat Negara .....	542
5)	Standar Pelayanan Reproduksi di Lingkungan Sekretariat Negara.....	548
d.	Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri.....	552
	Standar Pelayanan Administrasi Penugasan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai/Tenaga Indonesia untuk Tugas Belajar dan Tugas Dinas Lainnya.....	552
e.	Biro Umum.....	563
1)	Standar Pelayanan Penanganan Perbaikan atau Pengembangan Gedung Kantor, Rumah Dinas, Wisma serta Sarana dan Prasarana yang Berada dalam Penguasaan Sekretariat Negara.....	563
2)	Standar Pelayanan Penyediaan Jamuan Rapat Bagi Seluruh Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Negara.....	569
3)	Standar Pelayanan Perawatan Kendaraan Dinas Sekretariat Negara.....	574
4)	Standar Pelayanan Perizinan Penggunaan Gedung Serbaguna, Ruang Rapat, dan Wisma Sekretariat Negara.....	579
5)	Standar Pelayanan Kesehatan Dasar di Lingkungan Sekretariat Negara.....	584
6)	Standar Pelayanan Bidang Keamanan dan Ketertiban di Lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet.....	591
E.	Standar Pelayanan di lingkungan Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Dukungan Kebijakan.....	597
a.	Biro Analisis Kebijakan Dalam Negeri.....	597
	Standar Pelayanan Analisis Kebijakan Dalam Negeri.....	597
b.	Biro Dukungan Hubungan Internasional.....	603
	Standar Pelayanan Analisis Permasalahan dan Pelaksanaan Kebijakan Hubungan Internasional .....	603
c.	Biro Naskah dan Penerjemahan.....	609
	Standar Pelayanan Administrasi Pengangkatan dan Penarikan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Negara Sahabat dan Penerimaan Penempatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Negara Sahabat untuk Republik Indonesia.....	609
d.	Biro Dukungan Informatika.....	617
1)	Standar Pelayanan Pembangunan/Pengembangan Aplikasi Otomasi Perkantoran Skala Kecil di Lingkungan Sekretariat Negara.....	617
2)	Standar Pelayanan Penerapan Sistem Informasi Manajemen di Lingkungan Sekretariat Negara.....	624

3) Standar Pelayanan Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen di Lingkungan Sekretariat Negara.....	630
4) Standar Pelayanan Penyusunan Kerangka Acuan Kerja Sistem Informasi Manajemen di Lingkungan Sekretariat Negara.....	635
5) Standar Pelayanan Peminjaman dan Pengembalian Buku Perpustakaan di Lingkungan Sekretariat Negara.....	640
6) Standar Pelayanan Penyediaan Dokumen Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Sekretariat Negara.....	646
7) Standar Pelayanan Pengelolaan Jaringan Komunikasi Data di Lingkungan Sekretariat Negara .....	651
8) Standar Pelayanan Bantuan Teknis Pengoperasian Sistem di Sekretariat Negara.....	656
9) Standar Pelayanan Penyajian Data dan Informasi Hasil Pembangunan Nasional di Lingkungan Sekretariat Negara.....	660
F. Standar Pelayanan di lingkungan Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Sumber Daya Manusia.....	665
a. Biro Kepegawaian.....	665
1) Standar Pelayanan Administrasi Pengangkatan Dalam dan Pemberhentian dari Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Negara.....	665
2) Standar Pelayanan Administrasi Pengangkatan dalam dan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional.....	673
3) Standar Pelayanan Administrasi Pemberhentian/Pensiun Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Negara .....	684
4) Standar Pelayanan Administrasi Pemberhentian/Pensiun Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Negara .....	693
5) Standar Pelayanan Administrasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Negara.....	700
6) Standar Pelayanan Penyelenggaraan Administrasi Keputusan Presiden tentang Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pensiun Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya.....	715
b. Biro Organisasi dan Humas.....	727
1) Standar Pelayanan Pengusulan dan Evaluasi Organisasi di lingkungan Sekretariat Negara.....	727
2) Standar Pelayanan Penyusunan Sistem dan Prosedur Kerja di Lingkungan Sekretariat Negara.....	734
3) Standar Pelayanan Pemberian Informasi Kegiatan melalui Peliputan dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Negara...	740
c. Pusat Pendidikan dan Pelatihan.....	745
1) Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Struktural di Lingkungan Sekretariat Negara .....	745
2) Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional di Lingkungan Sekretariat Negara.....	755
3) Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis di Lingkungan Sekretariat Negara .....	770
G. Standar Pelayanan di lingkungan Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Hubungan Kelembagaan.....	781
a. Biro Hubungan Lembaga Negara.....	781

1) Standar Pelayanan Penyiapan Penyelenggaraan Pertemuan Konsultasi antara Presiden dengan Pimpinan Lembaga-Lembaga Negara.....	781
2) Standar Pelayanan Penyiapan Penyelenggaraan Rapat Kerja, Rapat Pembahasan Anggaran Sekretariat Negara, dan Pembahasan Rancangan Undang-Undang antara Mensesneg dengan DPR .....	788
3) Standar Pelayanan Pemantauan Kegiatan Lembaga Negara, Komisi dan Dewan Nasional.....	795
b. Biro Hubungan Lembaga Daerah.....	800
1) Standar Pelayanan Pemantauan Kegiatan Lembaga-Lembaga Daerah.....	800
2) Standar Pelayanan Penyiapan Saran dan Masukan Tentang Lembaga Daerah.....	805
c. Biro Hubungan Organisasi Politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat.....	810
1) Standar Pelayanan Penyiapan Saran dan Masukan Tentang Organisasi Politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat.....	810
2) Standar Pelayanan Pemantauan Kegiatan Organisasi Politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat.....	815
d. Biro Hubungan Organisasi Kemasyarakatan.....	821
Standar Pelayanan Pemantauan Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan.....	821
H. Standar Pelayanan di lingkungan Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan.....	826
a. Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Industri.....	826
1) Standar Pelayanan Analisis Penyiapan Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Undang-Undang di Bidang Moneter dan Jasa Keuangan, Perindustrian, Perdagangan dan Badan Usaha, Sumber Daya Alam, Prasarana dan Lingkungan Hidup .....	826
2) Standar Pelayanan Analisis dan Penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang di Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri.....	833
3) Standar Pelayanan Analisis dan Penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah di Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri.....	847
4) Standar Pelayanan Analisis dan Penyelesaian Rancangan Undang-Undang Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat di Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri.....	856
5) Standar Pelayanan Analisis dan Penyelesaian Rancangan Undang-Undang Prakarsa Pemerintah di Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri.....	868
6) Standar Pelayanan Analisis dan Penyiapan Pertimbangan Menteri Sekretaris Negara atas Rancangan Peraturan Presiden di Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri.....	880
b. Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat.....	885

1) Standar Pelayanan Analisis dan Penyelesaian Rancangan Undang-Undang Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat di Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat.....	885
2) Standar Pelayanan Analisis dan Penyelesaian Rancangan Undang-Undang Inisiatif Pemerintah di Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat.....	895
3) Standar Pelayanan Analisis dan Penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang di Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat.....	913
4) Standar Pelayanan Analisis dan Penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah di Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat.....	921
5) Standar Pelayanan Analisis dan Penyelesaian Pertimbangan Rancangan Peraturan Presiden di Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat.....	930
c. Biro Hukum dan Administrasi Peraturan Perundang-undangan.....	936
1) Standar Pelayanan Pendokumentasian dan Pendistribusian Peraturan Perundang-Undangn.....	936
2) Standar Pelayanan Analisis dan Penyusunan Pendapat Hukum atas Permasalahan Hukum Berkaitan Dengan Perkara/ Gugatan.....	941
3) Standar Pelayanan Analisis dan Penyusunan Pendapat Hukum atas Permasalahan Hukum Berkaitan Dengan Pengaduan Masyarakat.....	950
I. Standar Pelayanan di lingkungan Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Pengawasan.....	955
a. Biro Pengawasan Internal.....	955
Standar Pelayanan Audit Kinerja (Operasional) Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Negara.....	955
b. Biro Akuntabilitas Kinerja.....	963
1) Standar Pelayanan Pengkoordinasian Penyusunan Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja Sekretariat Negara.....	963
2) Standar Pelayanan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Negara.....	970
3) Standar Pelayanan Riviur Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Diterima Presiden Melalui Menteri Sekretaris Negara.....	977
4) Standar Pelayanan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Satuan Kerja di Lingkungan Sekretariat Negara.....	983
c. Biro Pengaduan Masyarakat.....	992
Standar Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Sekretariat Negara.....	992



SUSUNAN TIM PENYUSUN  
STANDAR PELAYANAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN  
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

**SUSUNAN TIM PENYUSUN STANDAR PELAYANAN UNIT KERJA  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

1. **Bambang Prajitno, S.H., M.M.** : Penanggung Jawab  
Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Sumber  
Daya Manusia
2. **Muhammad Saptamurti, S.H., M.A., M.Kn.** : Narasumber  
Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang  
Perundang-Undangan merangkap Anggota
3. **Djadjuk Natsir, S.H., M.M.** : Ketua merangkap  
Kepala Biro Organisasi dan Humas, Deputi  
Menteri Sekretaris Negara Bidang Sumber Daya  
Manusia Anggota
4. **Drs. Wawan Gunawan Pasya, Ak., M.M.** : Wakil Ketua merangkap  
Kepala Biro Akuntabilitas Kinerja, Deputi Menteri  
Sekretaris Negara Bidang Pengawasan Anggota
5. **Nandang Haris, S.IP., M.P.P.** : Sekretaris merangkap  
Kepala Bagian Ketatalaksanaan, Biro Organisasi  
dan Humas, Deputi Menteri Sekretaris Negara  
Bidang Sumber Daya Manusia Anggota
6. **Drs. Djarot Sri Sulistyio, M.Si.** : Anggota  
Kepala Biro Administrasi, Deputi Kepala Rumah  
Tangga Kepresidenan Bidang Kerumahtanggaan  
dan Pengelolaan Istana
7. **Drs. Dadang K. Anshory, M.M., M.Si.** : Anggota  
Kepala Biro Tata Usaha, Deputi Sekretaris Wakil  
Presiden Bidang Administrasi
8. **Drs. Sukma Irawan, M.Si.** : Anggota  
Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Menteri  
Sekretaris Negara
9. **Kiagus Usman, S.H., M.P.A.** : Anggota  
Kepala Biro Naskah dan Penerjemahan, Deputi  
Menteri Sekretaris Negara Bidang Dukungan  
Kebijakan
10. **Drs. Yuhardi R. Yusuf** : Anggota  
Kepala Biro Dukungan Hubungan Internasional,  
Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang  
Dukungan Kebijakan

11. **Dr. Suroto Adi, M.Sc.** : Anggota  
Kepala Biro Dukungan Informatika, Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Dukungan Kebijakan
12. **Drs. Yoseph Indrajaya, M.Si.** : Anggota  
Kepala Biro Hubungan Organisasi Politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat, Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Hubungan Kelembagaan
13. **Bigman Togar Simandjuntak, S.H., M.M.** : Anggota  
Kepala Biro Hukum dan Administrasi Peraturan Perundang-undangan, Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-Undangan
14. **M. Ari Setiawan, M.M.** : Anggota  
Kepala Bagian Perencanaan dan Pelaporan, Biro Administrasi, Deputi Kepala Rumah Tangga Kepresidenan Bidang Kerumahtanggaan dan Pengelolaan Istana
15. **Nurjoko S, S.IP.** : Anggota  
Kepala Bagian Tibkamdal, Biro Umum, Deputi Kepala Rumah Tangga Kepresidenan Bidang Kerumahtanggaan dan Pengelolaan Istana
16. **Dra. Hilda Nurul Afiah** : Anggota  
Kepala Bagian Administrasi Perbantuan, Biro Istana-Istana, Deputi Kepala Rumah Tangga Kepresidenan Bidang Kerumahtanggaan dan Pengelolaan Istana
17. **Thanon Aria Dewangga, S.IP., M.Si.** : Anggota  
Kepala Bagian Upacara dan Logistik, Biro Protokol, Deputi Kepala Rumah Tangga Kepresidenan Bidang Protokol, Pers, dan Media
18. **Drs. Budiyo** : Anggota  
Kepala Bagian Pelayanan Informasi, Biro Dokumentasi dan Pelayanan Informasi Pers dan Media, Deputi Kepala Rumah Tangga Kepresidenan Bidang Protokol, Pers, dan Media
19. **Moch. Taslim, S.Sos.** : Anggota  
Kepala Bagian Antar Negara, Biro Hubungan Internasional, Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Politik

20. **Yetni Murni, S.H.** : Anggota  
Kepala Bagian Politik Dalam Negeri, Biro  
Pemerintah dan Politik Dalam Negeri, Deputi  
Sekretaris Wakil Presiden Bidang Politik
21. **Sudi Hantono, S.IP.** : Anggota  
Kepala Bagian Kamtibmas, Biro Pertahanan  
Negara, Keamanan, dan Ketertiban, Deputi  
Sekretaris Wakil Presiden Bidang Politik
22. **Haryanto, S.IP.** : Anggota  
Kepala Bagian Hukum, Biro Kehakiman, Hukum  
dan Hak Asasi Manusia, Deputi Sekretaris Wakil  
Presiden Bidang Politik
23. **Dra. Tati Sri Haryati** : Anggota  
Kepala Bagian Wawasan, Biro Kewilayahan dan  
Wawasan, Deputi Sekretaris Wakil Presiden  
Bidang Politik
24. **Ahmad Lutfie, S.E., M.M.** : Anggota  
Kepala Bagian Fiskal dan Keuangan, Biro Moneter  
dan Jasa Keuangan, Deputi Sekretaris Wakil  
Presiden Bidang Ekonomi
25. **Drs. Karsono** : Anggota  
Kepala Bagian Perdagangan Dalam Negeri, Biro  
Perdagangan dan Kerjasama Internasional, Deputi  
Sekretaris Wakil Presiden Bidang Ekonomi
26. **Eddy Cahyono Sugiarto, S.Sos., M.Si.** : Anggota  
Kepala Bagian Pertanian dan Pangan, Biro  
Produksi, Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang  
Ekonomi
27. **Drs. Sunaryo, M.M.** : Anggota  
Kepala Bagian Energi, Biro Prasarana dan Energi,  
Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Ekonomi
28. **Drs. Bambang Suprianto** : Anggota  
Kepala Bagian Pemuda dan Olahraga, Biro  
Pendidikan, Kebudayaan, dan Olahraga, Deputi  
Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kesejahteraan  
Rakyat
29. **Daryanti, S.Sos.** : Anggota  
Kepala Bagian Kesehatan, Biro Kesehatan,  
Lingkungan Hidup, dan Perumahan Rakyat, Deputi  
Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kesejahteraan  
Rakyat

30. **Imam Sucahyo, S.H.** : Anggota  
Kepala Bagian Ketenagakerjaan, Biro Pemberdayaan Perempuan, Usaha Mikro, Kecil, dan Ketenagakerjaan, Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kesejahteraan Rakyat
31. **Dra. Sri Mulyani, M.Si.** : Anggota  
Kepala Bagian Pelaksanaan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, Biro Dukungan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
32. **Drs. Bambang Yudho Satrio, M.A.** : Anggota  
Kepala Bagian Pengawasan Pengelolaan Aset Negara, Biro Dukungan Pengawasan Pembangunan dan Pengelolaan Kekayaan Negara, Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
33. **Mumuh Kuswara, S.H.** : Anggota  
Kepala Bagian Pemantauan Penanggulangan Korupsi, Biro Pemantauan Pemberantasan Korupsi, Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
34. **Iwan Sunaryo, S.IP.** : Anggota  
Kepala Bagian Pengolahan Data Pembangunan dan Pengelolaan Kekayaan Negara, Biro Pengelolaan Data dan Pengaduan Masyarakat, Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
35. **Drs. Dwi Winarto, M.Si.** : Anggota  
Kepala Bagian Urusan Dalam, Biro Umum, Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Administrasi
36. **Mujiyono, S.Sos.** : Anggota  
Kepala Bagian Bangunan, Biro Perlengkapan dan Kerumahtanggaan, Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Administrasi
37. **Maisaroh Nurhajanti, S.Ag.** : Anggota  
Penerjemah Bahasa Arab, Pusat Penerjemahan dan Penyiapan Naskah, Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Administrasi

38. **Letnan Kolonel CHB Erwan Hartono** : Anggota  
Kepala Bagian Administrasi Pengamanan, Biro  
Operasi dan Pengamanan, Sekretariat Militer
39. **Drs. Tudjono** : Anggota  
Kepala Bagian Pengkajian dan Dokumentasi, Biro  
Tanda-tanda Jasa/Kehormatan, Sekretariat Militer
40. **Agus Widodo, S.IP., M.Si.** : Anggota  
Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Biro  
Perencanaan, Sekretariat Menteri Sekretaris  
Negara
41. **Hendrina Srijani, S.Sos.** : Anggota  
Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran Belanja  
Lain-lain, Biro Keuangan, Sekretariat Menteri  
Sekretaris Negara
42. **Moh. Subheki, SE.** : Anggota  
Kepala Bagian Administrasi Keuangan, Biro  
Keuangan, Sekretariat Menteri Sekretaris Negara
43. **Slamet Widodo, S.S., M.Si.** : Anggota  
Kepala Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan,  
Biro Tata Usaha, Sekretariat Menteri Sekretaris  
Negara
44. **Rika Kiswardani, S.IP., M.Pol.Admin.** : Anggota  
Kepala Bagian Kerjasama Teknik Bilateral, Biro  
Kerjasama Teknik Luar Negeri, Sekretariat Menteri  
Sekretaris Negara
45. **Abdul Rifai P. S.Sos.** : Anggota  
Kepala Bagian Kendaraan, Biro Umum,  
Sekretariat Menteri Sekretaris Negara
46. **Piping Supriatna, S.IP., M.Si.** : Anggota  
Kepala Bagian Perlengkapan, Biro Umum,  
Sekretariat Menteri Sekretaris Negara
47. **Drs. M. Chairul Mu'min, M.M.** : Anggota  
Kepala Bagian Penatausahaan Aset, Biro Umum,  
Sekretariat Menteri Sekretaris Negara
48. **Ir. Indra Iskandar, M.Si.** : Anggota  
Kepala Bagian Bangunan, Biro Umum, Sekretariat  
Menteri Sekretaris Negara

49. **drg. Melly Wundari** : Anggota  
Kepala Unit Kesehatan, Biro Umum, Sekretariat  
Menteri Sekretaris Negara
50. **Cecep Baharudin** : Anggota  
Kepala Unit Keamanan Dalam, Biro Umum,  
Sekretariat Menteri Sekretaris Negara
51. **Drs. Refly Badar, M.M.** : Anggota  
Kepala Bagian Politik dan Pemerintahan, Biro  
Analisis Kebijakan Dalam Negeri, Deputi Menteri  
Sekretaris Negara Bidang Dukungan Kebijakan
52. **Drs. Yakob, KM, M.Si.** : Anggota  
Kepala Bagian Hubungan MA, MK, dan BPK, Biro  
Hubungan Lembaga Negara, Deputi Menteri  
Sekretaris Negara Bidang Hubungan  
Kelembagaan
53. **Drs. Slamet Muhaemin, M.Si.** : Anggota  
Kepala Bagian Hubungan Lembaga Swadaya  
Masyarakat Pemberdayaan, Biro Hubungan  
Organisasi Politik dan Lembaga Swadaya  
Masyarakat, Deputi Menteri Sekretaris Negara  
Bidang Hubungan Kelembagaan
54. **Hamdani, B.A.** : Anggota  
Kepala Bagian Hubungan Ormas Kesamaan  
Agama dan Fungsi, Biro Hubungan Organisasi  
Kemasyarakatan, Deputi Menteri Sekretaris  
Negara Bidang Hubungan Kelembagaan
55. **Andri Kurniawan KP., S.Kom.** : Anggota  
Kepala Bagian Perencanaan dan Informasi  
Kepegawaian, Biro Kepegawaian, Deputi Menteri  
Sekretaris Negara Bidang Sumber Daya Manusia
56. **Drs. Harly Agung Prabowo, M.Si.** : Anggota  
Kepala Bagian Mutasi Pejabat Negara, Biro  
Kepegawaian, Deputi Menteri Sekretaris Negara  
Bidang Sumber Daya Manusia
57. **Drs. Sutrisno** : Anggota  
Kepala Bagian Kelembagaan, Biro Organisasi dan  
Humas, Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang  
Sumber Daya Manusia

58. **Drs. Masrokhani ...**

58. **Drs. Masrokhan** : Anggota  
Kepala Bagian Humas, Biro Organisasi dan  
Humas, Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang  
Sumber Daya Manusia
59. **Surya Dharma, B.B.A., S.E., M.M.** : Anggota  
Kepala Bagian Tata Usaha, Pusat Pendidikan dan  
Pelatihan, Deputi Menteri Sekretaris Negara  
Bidang Sumber Daya Manusia
60. **Agus Subagyo, S.H.** : Anggota  
Kepala Bagian Perindustrian, Perdagangan dan  
Badan Usaha, Biro Peraturan Perundang-  
Undangan Bidang Perekonomian dan Industri,  
Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang  
Perundang-Undangan
61. **Ni'mah Hidayah, S.H., M.H.** : Anggota  
Kepala Bagian Aparatur Negara, Biro Peraturan  
Perundang-Undangan Bidang Politik dan  
Kesejahteraan Rakyat, Deputi Menteri Sekretaris  
Negara Bidang Perundang-Undangan
62. **Novel Hasan, S.E., M.M.** : Anggota  
Auditor Ahli Madya pada Biro Pengawasan  
Internal, Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang  
Pengawasan
63. **Sofyan Syafri Lubis, S.E.** : Anggota  
Kepala Bagian Pelaporan Akuntabilitas Kinerja,  
Biro Akuntabilitas Kinerja, Deputi Menteri  
Sekretaris Negara Bidang Pengawasan
64. **Drs. Nata Rukitas, M.M.** : Anggota  
Kepala Bagian Pengaduan Masyarakat Bidang  
Hak Asasi Manusia, Pertanahan, dan Perumahan,  
Biro Pengaduan Masyarakat, Deputi Menteri  
Sekretaris Negara Bidang Pengawasan
65. **Dra. Lely Nova Harena** : Anggota  
Kepala Subbagian Penyiapan Pelayanan, Bagian  
Tata Graha, Biro Pelayanan Kerumahtanggaan,  
Deputi Kepala Rumah Tangga Kepresidenan  
Bidang Kerumahtanggaan dan Pengelolaan Istana
66. **R. Rhina Anita Ernita Martono, S.Sos., M.A.** : Anggota  
Kepala Subbagian Media Cetak, Bagian Media,  
Biro Pers dan Media, Deputi Kepala Rumah  
Tangga Kepresidenan Bidang Protokol, Pers, dan  
Media



67. **Sri Sukapti, S.Sos** : Anggota  
Kepala Subbagian Pendidikan dan Pelayanan Agama, Biro Agama dan Sosial, Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kesejahteraan Rakyat
68. **Dedy Triharjanto, S.E., M.M.** : Anggota  
Kepala Subbagian Acara II, Bagian Acara dan Protokol, Biro Protokol dan Persidangan, Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Administrasi
69. **Supriyanto, S.Sos.** : Anggota  
Kepala Subbagian Administrasi, Bagian Layanan Media Massa, Biro Media Massa, Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Administrasi
70. **Mayor Adm. Setiawan Wijayanto** : Anggota  
Kepala Subbagian Administrasi Pemberhentian, Biro Administrasi TNI dan POLRI, Sekretariat Militer
71. **Ma'analaif, S.H.** : Anggota  
Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan, Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Biro Umum, Sekretariat Militer
72. **Agussalim, S.IP., M.P.P.** : Anggota Sekretariat  
Kepala Subbagian Sistem dan Prosedur Kerja, Bagian Ketatalaksanaan, Biro Organisasi dan Humas, Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Sumber Daya Manusia
73. **Sri Puspawati** : Anggota Sekretariat  
Pegawai pada Biro Organisasi dan Humas, Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Sumber Daya Manusia
74. **Azis Puryono, S.Sos.** : Anggota Sekretariat  
Pegawai pada Biro Organisasi dan Humas, Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Sumber Daya Manusia
75. **Hermawan Wijayanto, S.H.** : Anggota Sekretariat  
Pegawai pada Biro Organisasi dan Humas, Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Sumber Daya Manusia
76. **Titiek Andriati** : Anggota Sekretariat  
Pegawai pada Biro Organisasi dan Humas, Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Sumber Daya Manusia

77. **Benediktus Samuel Hardiyanto** : Anggota Sekretariat  
Pegawai pada Biro Organisasi dan Humas, Deputi  
Menteri Sekretaris Negara Bidang Sumber Daya  
Manusia
78. **Dede Sutendi, A.Md.** : Anggota Sekretariat  
Pegawai pada Biro Organisasi dan Humas, Deputi  
Menteri Sekretaris Negara Bidang Sumber Daya  
Manusia
79. **Elisa Cintia Dewi, A.Md.** : Anggota Sekretariat  
Pegawai pada Biro Organisasi dan Humas, Deputi  
Menteri Sekretaris Negara Bidang Sumber Daya  
Manusia